



► BANSOS UNTUK JUDOL

Dinsos Berkoordinasi dengan Pusat

SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Sleman berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos), menyusul adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dugaan aktivitas judi *online yang dilakukan* 571.410 penerima bantuan sosial (bansos). Hingga saat ini, belum ada temuan penyalahgunaan bansos di Bumi Sembada.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengaku baru selesai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Sosial di Jakarta bersama kabupaten/kota lain se-Indonesia.

“Kami membicarakan temuan PPATK terkait judi *online* oleh penerima bansos dan DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional],” kata Ari di kantornya, Rabu (9/7).

Ari mengaku belum ada informasi mengenai penerima bansos yang terlibat judol di Sleman. Apabila ada, kepesertaan penduduk sebagai penerima bansos akan langsung dinonaktifkan.

Adapun pemberian bantuan sosial sejak Mei 2025 telah mengimplementasikan DTSEN sebagai data basis penerima bansos atau program perlindungan sosial/kesejahteraan sosial di Indonesia. Dasar implementasi itu adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemudian, Keputusan Menteri Sosial RI No.79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyatakan penerima bansos hanya yang berada dalam desil 1-5. Khusus Program Keluarga Harapan (PKH) hanya desil 1-4.

“Berkaitan dengan pemanfaatan DTSEN ini menjadi satu-satunya data sosial ekonomi yang akan digunakan di semua lembaga atau kementerian,” katanya.

Kepala Dinsos Sleman, Mustadi, mengatakan penyaluran bansos tidak lagi dilakukan berdasar DTKS. DTSEN menjadi satu-satunya basis penyaluran bansos. “DTSEN terdiri dari desil satu hingga 10. Kalau dulu pakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS]. Perbedaan utama kedua itu adalah DTSEN ada pembagian desil dan DTKS tidak ada, sekadar menyatakan keluarga masuk daftar DTKS saja,” kata Mustadi.

Mustadi menegaskan Dinsos Sleman juga berkomitmen memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, termasuk program kesejahteraan sosial lain. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang ingin mengakses jaringan pengaman sosial (JPS), verifikasi harus dilakukan hingga tempat tinggal penerima. (Andreas Yuda Pramono)